



# Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel

Wafiq Laelatul Kodrianingsih<sup>1</sup>, Rispawati<sup>2</sup>, Bagdawansyah Alqadri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: [wafiq.laelatul14@gmail.com](mailto:wafiq.laelatul14@gmail.com), [rispa64@gmail.com](mailto:rispa64@gmail.com), [bagda.alqadri@unram.com](mailto:bagda.alqadri@unram.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-07	This study examines the strategy of the Aikmel Village government in increasing community participation in village development, as well as the factors that hinder and support the implementation of the village government strategy in increasing community participation in development. The focus of the research: (1) the strategy of the village government in increasing community participation in development, (2) community participation in village development, (3) the inhibiting and supporting factors for the implementation of the village government strategy in increasing community participation in development. As for the results of research that has been carried out related to the village government strategy in increasing community participation in development in Aikmel Village, it has been good. The strategy for overcoming obstacles includes inviting the community directly so that the community is moved and can provide input about the potential of the community in a deliberation. Provide socialization to provide motivation and provide an understanding of the importance of community participation in development. Improving approaches and coaching so that people voluntarily want to donate labor, equipment or funds.
<b>Keywords:</b> <i>Village Government;</i> <i>Community Participation;</i> <i>Village Development.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-07	Penelitian ini mengkaji tentang strategi pemerintah Desa Aikmel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Fokus penelitian: (1) strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, (3) faktor penghambat dan pendukung berjalannya strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Adapun hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait Strategi pemerintahan desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel sudah baik. Adapun Strategi dalam mengatasi hambatan diantaranya dengan mengundang masyarakat secara langsung sehingga masyarakat tergerak dan dapat memberikan masukan tentang potensi yang dimiliki masyarakat dalam suatu musyawarah. Memberikan sosialisasi untuk memberikan motivasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Meningkatkan pendekatan dan pembinaan sehingga masyarakat dengan sukarela mau menyumbangkan tenaga, alat ataupun dana.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pemerintah Desa;</i> <i>Partisipasi Komunitas;</i> <i>Pembangunan Desa.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan desa mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 berbunyi tujuan pembangunan desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan juga kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas desa dll untuk mengurangi infrastruktur. dan memanfaatkan SDA dan ekologi yang berkelanjutan. Pembangunan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Menurut Rosidin dikutip dari (Astri Nurintan dkk, 2020:200) menyatakan persyaratan dasar rakyat yang diundang untuk ikut serta di acara berbangsa dan bernegara adalah yang ikhlas tanpa pemaksaan, komitmen emosional dan menerima, langsung atau tidak langsung, manfaat dari partisipasi mereka, sehingga partisipasi dalam penyelenggaraan negara sangat penting. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan memerlukan aparatur atau bagian pemerintahan yang bisa menjalankan dan memberi arahan untuk rakyat supaya melaksanakan tujuan pembangunan pada konteks tersebut. Itu sebabnya kepala desa memegang peranan penting. Mengacu pada Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 “Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut juga sebagai kepala tertinggi pemerintahan desa, dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa.” Secara administratif, desa bukannya terdiri dari kepala desa dan perangkat lainnya, tetapi masyarakat masuk juga ke dalamnya, yang merupakan bagian dari anggota yang dinamakan BPD

Hal ini menciptakan prinsip check and balances sebagai pendukung demokrasi, sehingga pemerintah desa tidak seenaknya saja ketika melaksanakan tugasnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan tersebut adalah guna memperkuat pelaksanaan NKRI. Menurut Soetrisno dalam (Panji Asri Sandi dkk, 2021:16) mendefinisikan partisipasi sebagai keinginan masyarakat untuk tanpa syarat mendukung program pemerintah dan tujuannya yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan tidak berarti dan tidak ada jaminan bahwa tujuan yang diinginkan akan tercapai. Keberhasilan mewujudkan tujuan pelaksanaan pembangunan tidak hanya bergantung terhadap kekuatan aparatur pemerintah, melainkan mengacu pada usaha mengenali kemampuan dan kepastian masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program pembangunan (Ripai, 2013).

Atharuddin, S.Sos Sekretaris LKMD Desa Aikmel Tahun 2014-2019, Permasalahan pembangunan Desa Aikmel (Administrator, 2019) adalah sebagai berikut (1) Petani, pejalan kaki dan kendaraan roda dua atau empat sering mengeluhkan kemacetan lalu lintas Waktu ditata kegiatan sosial dan kegiatan konvensional. (2) Konflik antar kelompok menimbulkan kerusakan parah fasilitas umum kota dan menurunkan PAD kota. (3) Jalan alternatif Batu Belek Mualan Raya menuju Jalan Wisata Desa Muhajirin menuju Koang Linong belum diaspal. (4) Penataan tempat wisata di Pesanggerahan yang tidak bersih. (5) Jalan di setiap desa tidak memadai. (6) Masjid At-taqwa Batu Belek di pinggir jalan belum dibangun. Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis memaparkan rumusan yaitu, pertama, bagaimana strategi pemerintah desa Aikmel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Aikmel Lombok Timur, dan kedua, apa saja penghambat dan pendukungnya faktor pemerintah desa

merupakan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Aikmel Lombok Timur.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi Setelah semua data penelitian yang sudah di butuhkan terkumpul, kemudian data di analisis dengan teknik Miles dan Huberman (1984) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Aikmel mulai dari bulan April 2023 sampai bulan Mei 2023.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Aikmel

Dalam strategi pemerintah Desa Aikmel untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa membuat beberapa bentuk tindakan yang penting untuk partisipasi masyarakat yaitu. peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Mubiyarto (1983), pentingnya partisipasi masyarakat yakni supaya masyarakat adanya peningkatan keikutsertaannya di luar masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa harus meningkatkan partisipasi masyarakat, dimulai dengan petisi dan diakhiri dengan pembuatan program dimana masyarakat memiliki kepentingannya masing-masing dalam setiap program.

Terkait kegiatan masyarakat, pengurus Desa Aikmel ingin meningkatkan kapasitas semua pihak yang ikut langsung atau tidak ikut serta langsung pada kegiatan pembangunan tentu melalui keterlibatan mereka untuk mengambil keputusan serta kegiatan lebih lanjut dalam jangka panjang.

Berikut peneliti akan menguraikan berdasarkan sub indikator agar tercapainya indikator yang sudah di tentukan, hasil dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan bersama subjek dan informan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a) Misi

Desa Aikmel, dalam indikator dan di bagi menjadi beberapa sub indikator yaitu misi. Misi desa dilaksanakan atau dipenuhi oleh perangkat desa didasari visi desa yang disetujui, sehingga tujuan pembangunan desa bisa dilaksanakan dan berfungsi dengan baik dan selaras dengan tujuannya. Strategi pemerintah Desa Aikmel dalam mencapai tujuan sesuai dengan misi pemerintah desa. Melalui visi dan misi pemerintah desa di rumuskan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Aikmel. Menurut Geoff Mulgan (2009) Misi yaitu sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemerintahan, mulai dari awal pemerintahan visi dan misi ditetapkan sebagai landasan untuk menjalankan pemerintahan selama kurang lebih enam tahun kepemimpinan.

#### b) Kemampuan Menjalankan Misi

Pemerintah desa melakukan Strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah salah satu cara yang sesuai dengan sub indikator kemampuan menjalankan suatu misi salah satu turunan dari indikator tujuan. Menurut Geoff Mulgan (2009) dalam indikator tujuan ada sub pembagiannya salah satunya adalah kemampuan menjalankan misi, maksudnya bagaimana pemerintah Desa Aikmel melaksanakan misi yang sudah di tetapkan. Menurut Theresia Et All (2015: 196) terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat yaitu ada beberapa unsur utama yaitu pertama memiliki kesempatan dan di berikan untuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi, kedua adalah kemauan masyarakat supaya ikut serta, ketiga adalah keahlian masyarakat untuk ikut serta.

### 2. Lingkungan

#### a) Kondisi Alam

Dalam indikator lingkungan menurut Geoff Mulgan (2009) terdapat sub indikator yakni salah satunya adalah kondisi alam. Pemerintah Desa Aikmel memantau kegiatan yang sedang berlangsung dengan berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai perkembangan kegiatan atau program

tersebut. Hal ini mengacu pada apa yang dikatakan Mubyarto (1983:35) dari beberapa bentuk keterlibatan masyarakat, yaitu pengawasan dewan dan pengawasan atau pekerjaan pembangunan. Oleh karena itu, pemantauan kegiatan pemerintah Desa Aikmel dan tokoh masyarakat menjadi efektif karena mereka akan mengetahui perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung.

#### b) Perubahan Manusia

Dalam indikator lingkungan menurut Geoff Mulgan (2009) terdapat sub indikator yakni salah satunya adalah perubahan manusia, Dalam penelitian ini perubahan manusia di Desa Aikmel diakibatkan dengan kemunculan Covid-19 yang berdampak pada masyarakat itu sendiri, keadaan alam bahkan prekonomian masyarakat juga ikut terkena dampak. Untuk menangani permasalahan ini pada masa Covid-29 strategi pemerintah desa melanjutkan koordinasi dari pemerintah pusat ialah 40% dana desa di alih fungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat Desa Aikmel. Pemerintah desa Aikmel menerapkan strategi tindakan berkelanjutan dengan berperan aktif dalam tindakan untuk dapat mengetahui perkembangan kegiatan atau program yang sedang berjalan.

### 3. Pengarahan

#### a) Koordinasi

Dalam indikator pengarahannya ada namanya koordinasi. Salah satu koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Aikmel adalah berkoordinasi langsung dengan pengurus di bawahnya, seperti Kadus dan RT, serta menggunakan fasilitas yang ada di wilayah desa, seperti mikrofon masjid, dan juga terjun langsung ke balai desa untuk menginformasikan dan juga membimbing masyarakat sedemikian rupa sehingga terjalin hubungan antara kepala desa dengan masyarakat dan terjalin rasa saling percaya, sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam setiap kegiatan.



**Gambar 1.** Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Bersama Kadus dan RT

Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aikmel dapat menimbulkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan berdampak besar bagi kemajuan dan pembangunan desa.

b) Motivasi

Dalam indikator pengarahan ada namanya motivasi, Insentif yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Aikmel merupakan salah satu dari strategi pemerintah desa untuk bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk menjangkau rumah-rumah masyarakat untuk memberikan umpan balik tentang pentingnya partisipasi mereka. Berkontribusi dalam pembangunan desa dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan, yang tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan dan bersedia berpartisipasi. Menurut Geoff Mulgan (2009), motivasi adalah “keadaan pribadi seorang individu yang menumbuhkan keinginan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan”. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti bahwa motivasi merupakan unsur penting bagi pemerintah untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi.

c) Komunikasi

Dalam indikator pengarahan ada namanya komunikasi, proses penyampaian informasi dari satu individu ke individu lain dan individu ke suatu kelompok. Komunikasi yang dilakukan pemerintah desa Aikmel salah satunya dengan menggunakan fasilitas yang ada di wilayah desa seperti *microphone* masjid, dan terjun langsung kemasya-

rakat untuk menginformasikan kepada masyarakat dan menjalin silaturahmi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat dan saling percaya sehingga terjalin kerjasama yang baik. Baik dalam segala aktivitas.



**Gambar 2.** Daftar Hadir Peserta

Seperti yang dinyatakan oleh Geoff Mulgan (2009), komunikasi adalah “proses pertukaran informasi untuk mencapai suatu unit tindakan bersama”. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan oleh kepala Desa Aikmel dapat menimbulkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan berdampak besar bagi kemajuan dan pembangunan desa.

d) Perintah

Dalam indikator pengarahan sesuai dengan teori Geoff Mulgan (2009) ada namanya perintah. Perintah yang dilakukan oleh pemerintah desa aikmel dengan tujuan mengajak dan memberikan peluang partisipasi masyarakat desa dalam segala tahap kegiatan pembangunan. perintah yang di keluarkan oleh pemerintah desa berkaitan dengan tujuan karena instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa merupakan lanjutan dari atau tindak lanjut dari instruksi pemerintahan pusat.

4. Tindakan

a) Situasi Masyarakat

Situasi masyarakat adalah bagian dari satu indikator tindakan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009). Di Desa Aikmel ternyata di temukan adanya konflik di dalam masyarakat dikarenakan oleh pemilihan umum kepala desa priode 2021-2027. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti dapat diketahui

tindakan pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan dengan adanya konflik sosial yang ada di masyarakat tidak mengurangi semangat pemerintah melakukan koordinasi kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Aikmel.

b) Kegiatan Yang Digunakan

Tindakan adalah salah satu indikator yang di kemukakan oleh Geoff Mulgan (2009). Indikator Tindakan ini memiliki pembagian salah satunya adalah kegiatan yang digunakan. Hasil penelitian di temukan banyak sekali strategi yang di gunakan oleh pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi yaitu pertama Instruksi Pemerintah Desa Aikmel, Adanya instruksi dari pemerintah desa ke masyarakat menunjukkan terjadinya sebuah komunikasi dan terlaksananya prinsip good governance ataupun pemerintah yang baik dimana setiap kegiatan membutuhkan partisipasi masyarakat. Yang kedua Rapat Koordinasi, Rapat koordinasi yang juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Aikmel mendikte kepada masyarakat dalam sebuah pembangunan desa diperlukannya partisipasi masyarakat maka diperlukan rapat koordinasi. Yang ketiga RPJM Desa, RPJM Desa yang di maksud di sini harus dijadikan sebagai rujukan utama atau pedoman dalam pelaksanaan program kerja yang akan dilakukan nantinya mengingat pelaksanaan pembangunan mampu untuk mendobrak keterpurukan desa dan menjadikan desa menjadi lebih maju.

c) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses terakhir dalam sebuah perencanaan, sesuai dengan indikator tindakan menurut teori Geoff Mulgan (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dapatkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di awali dari musyawarah ditingkat dusun dan melibatkan lembaga kemasyarakatan menjadi refrensi baru dalam proses kebijakan. Akhir dari pengambilan keputusan akan didapatkannya sebuah rancangan

pembangunan, apa saja yang akan di bangun beserta cara pelaksanaannya dalam enam tahun pemerintahan.

5. Pembelajaran

a) Metode Perbandingan

Metode perbandingan adalah salah satu indikator yang di kemukakan oleh Geoff Mulgan (2009). Kegiatan perbandingan ini di ikuti oleh masyarakat Desa Aikmel, sebagai pengawas serta masyarakat dapat memberikan ide untuk pembangunan sesuai dengan keadaan desa karena yang lebih tau kondisi daerahnya itu adalah orang yang tinggal di daerah tersebut.

b) Identifikasi

Identifikasi adalah salah satu indikator yang di kemukakan oleh Geoff Mulgan (2009), identifikasi adalah kecendrungan keinginan untuk sama, dan lebih berkaitan dengan identitas diri. Proses kegiatan identifikasi dilakukan dengan cara pemerintah turun langsung melihat kondisi wilayah sasaran pembangunan dan masyarakat juga turut berpartisipasi, partisipasi masyarakat ini adalah salah satu alat pembanding dalam kegiatan pembangunan sebab masyarakat yang merasakan hasil dari pembangunan itu dan tujuannya adalah masyarakat.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Aikmel Lombok Timur**

Faktor penghambat strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel sesuai dengan teori dari Raharjo Adisasmita (2006) berupa sikap masyarakat, kondisi geografis, dan perekonomian masyarakat. Faktor pendukung strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sesuai dengan teori dari Goldsmit dan Blustain dalam Ndraha (1987) berupa kebutuhan masyarakat, kepentingan dan minat masyarakat, serta adat istiadat. Berikut peneliti akan menguraikan berdasarkan sub indikator agar tercapainya indikator yang sudah di tentukan, hasil dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang

dilakukan bersama subjek dan informan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

a) Sikap Masyarakat

Sikap yang di miliki oleh masyarakat dapat menghambat strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, seperti sikap apatis, malas, masa bodoh dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat masyarakat dan menjadi salah satu faktor penghambat di Desa Aikmel. Jika di tinjau dari teori Raharjo Adisasmita (2006) terkait dengan salah satu faktor penghambat yaitu sikap masyarakat yang berasal dari diri individu itu sendiri. Cara mengatasinya adalah dengan cara memperbanyak koordinasi dan juga motivasi oleh pemerintah untuk masyarakat agar memberi pemahaman dan juga meningkatkan rasa keinginan untuk ikut berpartisipasi.

b) Kondisi Geografis

Kondisi geografis yang ada di Desa Aikmel dapat menghambat strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti lokasi pembangunan yang terlalu padat dan lingkungan masyarakat. Salah satu kendala untuk berpartisipasi di Desa Aikmel adalah desa tersebut acuh tak acuh terhadap kondisi geografis sehingga strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa tidak membuahkan hasil yang baik. Menurut teori Raharjo Adisasmita (2006) merujuk pada salah satu faktor penghambat yaitu kondisi geografis, dimana kondisi geografis tersebut harus dikendalikan agar hasil pembangunan yang dilakukan dengan baik tidak berdampak negatif.

c) Kondisi Prekonomian

Faktor ekonomi adalah pendapatan dan mata pencaharian masyarakat. Pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan sosial. Faktor ekonomi itulah yang menjadi alasan mengapa masyarakat desa Aikmel jarang terlibat dalam kegiatan pembangunan yang lebih mengutamakan pekerjaannya daripada program

pembangunan. Menurut teori Raharjo Adisasmita (2006), mengacu pada faktor penghambat yaitu perekonomian masyarakat. Banyak orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah akibat dari pekerjaan yang bertentangan dengan waktu.

2. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

a) Kebutuhan, Kepentingan, Dan Minat Masyarakat

Kebutuhan, kepentingan dan minat yaitu salah satu faktor pendukung keikutsertaan ataupun partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Masyarakat Desa Aikmel mempunyai tiga faktor tersebut untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Goldsmit dan Blustain dalam Ndraha (1987). Masyarakat yang menjadi perwakilan dalam musyawarah yang diadakan pemerintah desa, menghadiri dan aktif memberikan ide dan saran, serta menyampaikan keluhan dan kebutuhan dari masyarakat di Desa Aikmel.

b) Adat Istiadat Masyarakat

Kesadaran akan adat istiadat contohnya dalam membangun desa perlu adanya partisipasi masyarakat sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Goldsmit dan Blustain dalam Ndraha (1987). Masyarakat Desa Aikmel masih memiliki adat istiadat yang cukup kental, dalam hal pembangunan desa kesadaran akan partisipasi masyarakat seperti gotong royong, berpartisipasi semampunya, seperti menyumbangkan makanan, minuman, dan rokok kepada para pekerja, termasuk kedalam hal yang patut di apresiasi kepada masyarakat guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kedepannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, kesesuaian antara hasil penelitian ini berdasarkan

indikator dari strategi pemerintah desa sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah Desa Aikmel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel yaitu: Rapat koordinasi sebagai langkah awal untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Desa Aikmel. Pendataan, sebelum melakukan penyusunan perlu adanya referensi atau pandangan yang terjadi di lapangan untuk menentukan fokus poin pembangunan yang akan diprioritaskan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2. Penghambat dan pendukung Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel.
  - a) Faktor yang menghambat strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sikap masyarakat yang acuh tak acuh, lalu kondisi geografis, kondisi prekonomian masyarakat.
  - b) Faktor yang mendukung strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan adalah kebutuhan, kepentingan dan minat masyarakat, adat istiadat masyarakat Desa Aikmel.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Makasar: Graha Ilmu Arikunto.
- Administrator. 2019. *Profil dan kondisi Desa Aikmel*. Kabupaten lombok timur (Kecamatan Aikmel), <http://portal.lomboktimurkab.go.id>, Akses: 29 Mei 2022.
- Alfarizi Moh Ridho Imam, Rispawati, Basariah. 2022. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Mataram.
- Irianti Nani, Ismail, Alqadri Bagdawansyah. 2020. *Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Prinsip Transparansi Good Governance (Studi Deskriptif Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah)*. Universitas Mataram.
- Kasim. Alwi Hamdi. 2022. *Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Miles, Huberman. 1987. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.
- Mubarak Muhamad Zakie, Rispawati, Yuliatin. 2019. *Upaya Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak (Studi Di Desa Saba Kabupaten Lombok Tengah)*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan.
- Mubiyarto. 1984. *Pembangunan Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan*. Liberty. Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara
- Nurintan Astri, Rispawati, Alqadri Bagdawansyah. 2020. *Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar*. Indonesia journal of social sciences and humanities. Vol. 1 No. 3. 2020: 195-207
- Ripai, Andi. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, Universitas Hasannudin Makasar*, di akses pada hari kamis 24 maret 2022, pukul 16:39 wita.
- Sandi Panji Asri, Rispawati, Yuliatin, 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemerintah Desa (Studi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Lombok Timur)*. Universitas Mataram. Lombok Timur. NTB.
- Sugiyono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014. *Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan.* Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Yogyakarta: Pustaka Mahardika.